



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 171/Bua.2/Kp.04.1/12/2019
Lampiran : -
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat
Non KPO Periode April 2020

20 Desember 2019

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

di

Tempat

Dalam rangka proses usul Kenaikan Pangkat Non KPO periode April 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap operator SIKEP Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Pegawai yang naik pangkat periode April 2020 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KP STRUKTURAL dan segera melengkapi data beserta e-doc pada SIKEP paling lambat tanggal 24 Januari 2020.
2. Data dan e-doc yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah :
 - a. SK Pangkat terakhir
 - b. SK Jabatan Terakhir
 - c. SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan Terakhir
 - d. SKP Tahun 2018 dan 2019
 - e. Ijasah Terakhir beserta transkrip nilai dan Surat Ijin Belajar
 - f. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II
 - g. Sertifikat Diklat PIM III

Dokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
 - a. Data yang diusulkan adalah **pegawai Golongan IV/a ke atas yang menduduki jabatan struktural Non Teknis;**
 - b. Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a bukan karena pendidikan S2, wajib menginput STLUUD/ Sertifikat Diklat PIM III beserta e-docnya di SIKEP;
 - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses Non KPO setiap unsurnya wajib **bernilai baik;**
 - d. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada e-doc SKP, jika atasan langsung pada saat itu berasal dari instansi luar, maka data yang diisi adalah pejabat saat ini;
 - e. Data gelar dan pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN;

4. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka **Kenaikan Pangkatnya tidak akan diproses pada periode April 2020.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Sekretaris Mahkamah Agung RI.